

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Letusan gunung berapi merupakan peristiwa alam yang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam hal komunikasi risiko dan pengelolaan informasi publik. Dalam konteks kebencanaan, komunikasi menjadi aspek penting karena keberhasilan penanganan bencana tidak semata ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi oleh seberapa efektif pesan-pesan risiko disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Tanpa komunikasi yang tepat, peringatan dini sering kali tidak direspon dengan baik, dan tindakan penyelamatan diri menjadi terlambat.

Gunung Marapi di Sumatera Barat merupakan salah satu gunung api aktif yang memiliki riwayat letusan cukup tinggi. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), pada awal tahun 2023 aktivitas vulkanik Marapi menunjukkan peningkatan signifikan, dengan letusan eksplosif terjadi antara 7 Januari hingga 20 Februari. Setelah periode tenang, pada 3 Desember 2023 terjadi letusan besar dengan kolom abu mencapai sekitar 3.000 meter (PVMBG, 2023). Peristiwa ini menjadi perhatian nasional karena menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis di berbagai wilayah sekitarnya.

Salah satu sektor yang terdampak paling parah adalah pertanian, terutama di Nagari Canduang Koto Laweh, Lasi, dan Bukik Batabuah, Kabupaten Agam. Abu vulkanik menutupi lahan pertanian, menyebabkan kerusakan pada tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, tomat, dan kubis. Sebagian besar petani mengalami gagal panen total (puso), yang berdampak langsung pada ekonomi

rumah tangga dan ketahanan pangan lokal (Katasumbar, 2023; Sinartani, 2023). Namun, di balik dampak material tersebut, terdapat persoalan komunikasi yang tak kalah penting, banyak petani mengaku tidak mengetahui secara jelas tahapan mitigasi yang harus dilakukan setelah erupsi, termasuk bagaimana melaporkan kerugian dan memperoleh bantuan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara lembaga penanggulangan bencana dan masyarakat terdampak.

Dampak erupsi juga menjalar ke sektor transportasi udara. Abu vulkanik yang terbawa angin menuju wilayah udara Kota Padang menyebabkan otoritas penerbangan menetapkan status red alert, memaksa sejumlah penerbangan dibatalkan (Tempo, 2023). Keputusan tersebut merupakan bentuk nyata penerapan komunikasi risiko antarsektor, di mana koordinasi lintas lembaga dan penyampaian pesan keselamatan harus dilakukan dengan cepat dan jelas agar tidak menimbulkan kepanikan publik.

Dalam konteks ini, komunikasi kebencanaan memegang peran sentral. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas menyebarluaskan informasi, memperingatkan masyarakat, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Namun, tantangan besar muncul ketika pesan tidak tersampaikan secara merata, atau justru kalah cepat dibandingkan dengan penyebaran informasi tidak valid di media sosial. BNPB bahkan mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mempercayai berita tanpa sumber resmi karena dapat memicu kepanikan (ESDM, 2023; NU Online, 2023).

Fenomena ini menegaskan bahwa bencana bukan hanya urusan alam, tetapi juga urusan komunikasi. Kegagalan komunikasi bisa memperbesar dampak

bencana, sementara keberhasilan komunikasi mampu menyelamatkan banyak nyawa. Seperti dikatakan Covello (2001), komunikasi risiko berperan untuk membangun kepercayaan, kredibilitas sumber, dan pemahaman publik dalam menghadapi situasi berisiko tinggi. Dalam kasus Gunung Marapi, hal ini berarti BPBD harus mampu menyalurkan pesan mitigasi secara tepat waktu, konsisten, dan disampaikan dengan empati agar masyarakat mau mendengarkan dan bertindak sesuai arahan.

Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan *Ring of Fire* yang menjadikannya negara dengan risiko geologis tinggi (National Geographic, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko melalui peningkatan kesadaran, edukasi publik, serta penguatan kapasitas masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mitigasi sering kali masih berfokus pada pembangunan fisik (mitigasi struktural), sementara aspek komunikasi, pendidikan publik, dan partisipasi masyarakat (mitigasi non-struktural) belum berjalan optimal (Kementerian PUPR, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu menggarisbawahi lemahnya aspek komunikasi dalam penanggulangan bencana. Puspito (2011) menemukan bahwa keterlambatan masyarakat dalam merespons peringatan dini kerap disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap sumber informasi resmi. Surono (2013) dalam kajiannya mengenai erupsi Merapi 2010 juga menyoroti bahwa sebagian besar korban terjadi karena pesan peringatan tidak direspons tepat waktu akibat rendahnya kejelasan dan kredibilitas informasi. Sementara itu, Adiyoso dan Kanegae (2012) menjelaskan bahwa komunikasi mitigasi harus dilihat sebagai

proses sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat, bukan sekadar penyampaian pesan satu arah.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi mitigasi dijalankan oleh BPBD Kabupaten Agam dalam menghadapi ancaman erupsi Gunung Marapi. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana lembaga tersebut menyusun pesan, membangun kepercayaan publik, serta memastikan pesan mitigasi dapat diterima dan dipahami masyarakat di wilayah rawan bencana.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada konteks bencana itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana komunikasi dapat menjadi alat utama dalam mengurangi risiko. Di tengah meningkatnya ancaman erupsi dan maraknya penyebaran informasi tidak akurat di media sosial, efektivitas komunikasi dari lembaga resmi seperti BPBD menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Komunikasi Mitigasi Bencana Alam dalam Menghadapi Ancaman Erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi komunikasi risiko yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Marapi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh lembaga terkait dalam

menghadapi potensi erupsi Gunung Marapi, dengan mengacu pada prinsip-prinsip komunikasi risiko. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi bagaimana strategi komunikasi risiko diterapkan oleh lembaga terkait dalam menyampaikan informasi serta meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman erupsi Gunung Marapi.
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang muncul dalam proses komunikasi risiko, baik dari sisi lembaga penyampai pesan maupun penerima pesan (masyarakat), serta bagaimana hambatan tersebut memengaruhi efektivitas mitigasi bencana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang komunikasi risiko yang berperan penting dalam mitigasi bencana alam. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana prinsip-prinsip komunikasi risiko, seperti kepercayaan dan kredibilitas, keterbukaan informasi, serta empati, dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dalam konteks penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada studi komunikasi bencana dan kebijakan publik di bidang penanggulangan risiko.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran konstruktif bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam serta pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi risiko pada situasi bencana. Temuan penelitian ini dapat membantu lembaga dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat strategi penyampaian pesan yang lebih empatik dan transparan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman erupsi Gunung Marapi.

